

TESIS
***COLLABORRATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGGULANGAN**
***STUNTING* DI KABUPATEN PASANGKAYU**

COLLABORRATIVE GOVERNANCE IN PASANGKAYU REGENCY

HASRIADI

E012221015



PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**COLLABORRATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN
STUNTING DI KABUPATEN PASANGKAYU**

Disusun dan diajukan oleh

HASRIADI

E012221015

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal 31 Juli 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan,

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Thahir Haning, M.Si.
NIP 195705071984031001

Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.
NIP 196801011997022001

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin,

Dr. Gita Susanti, M.Si
NIP 196503111991032001



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si.
NIP. 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hasriadi

Nim : 012221015

Program Study : Magister Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN PASANGKAYU

adalah karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan hasil tulisan atau pemikiran orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dituliskan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Makassar, 31 Juli 2024



Hasriadi

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Dengan kerendahan hati dan rasa syukur tiada hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya serta nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Pasangkayu. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister (S2) pada Program Magister Pasca sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, namun tesis ini disusun atas dasar kesabaran dan kerja keras yang melibatkan banyak pihak, dan alhamdulillah penulis berhasil mewujudkan harapan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan proses kolaborasi yang akan di lakukan kedepanya Banyak tantangan maupun kendala penulis dalam penyusunan tesis ini. Namun dengan satu keyakinan dan harapan yang begitu besar bahwa untuk meraih yang terbaik memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit pula, sehingga tantangan dan rintangan tersebut menjadi makna sebuah pengorbanan. Penyelesaian studi dan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berwujud bimbingan teknis, moral maupun material.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap cinta serta rasa hormat kepada kedua orang tua penulis (**Husna dan Mara ali**) yang telah merawat dan membesarkan serta senantiasa mendidik, mendukung dan mendoakan penulis hingga detik ini. Untuk Ibunda tercinta penulis sangat berterima kasih, penulis yakin ibunda sedang mendoakan kesuksesan dan menunggu anaknya (penulis) dalam keadaan apapun itu, semoga ibunda diberikan kesehatan, umur yang panjang dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Untuk Ayahanda tercinta terima kasih banyak atas kasih sayang yang telah diberikan, doa, nasehat dan semangat yang telah diberikan, semoga ayahanda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Jasa-jasa Ibunda dan Ayahanda tentu tidak bisa dinilai dengan apapun dan tidak akan pernah bisa rampung jika dituliskan dalam buku. Namun, sebagai anak, penulis senantiasa hanya bisa memberikan kebahagiaan dan mendoakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Yaa Rab.

Pada kesempatan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si.** Selaku Rektor Unhas beserta para wakil Rektor Universitas Hasanuddin, staf dan jajarannya.
2. **Bapak Dr. Phil, Sukri, M.Si.** Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan dan staf.
3. **Ibu Dr. Gita Susanti, M.Si.** Selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang selama ini memberikan saya motivasi untuk menyelesaikan studi ini sekaligus juga sebagai dosen penguji saya dengan selalu menyempatkan waktu dan kritik bagi penulisan tesis ini. dan Penulis sangat berterima kasih dan berharap

semoga bapak senantiasa dalam lindungannya serta segala kebaikan yang diberikan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

4. **Prof Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si.** selaku pembimbing satu yang telah menyempatkan waktu dan memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga bapak senantiasa dalam lindungannya serta segala kebaikan yang diberikan bernilai ibadah disisi Allah SWT.
5. **Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.** selaku pembimbing kedua yang sudah memberikan waktunya dalam membimbing penulisan dalam proses penyelesaian tesis ini dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga bapak senantiasa dalam lindungannya serta segala kebaikan yang diberikan bernilai ibadah disisi Allah SWT.
6. **Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si. Dr. Nurdin Nara, M.Si. dan Dr. Muhammad Yunus, MA.** Selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu dan memberikan saran serta kritikan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga bapak/ibu senantiasa berada dalam lindungannya serta segala kebaikan yang diberikan bernilai ibadah disisi Allah SWT.
7. Para dosen **Prodi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Hasanuddin** selama kurang 3 semester. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan selama ini. Berharap semoga Bapak Ibu sehat selalu, senantiasa dalam lindungannya serta segala kebaikan yang diberikan bernilai ibadah disisi Allah SWT.

8. Seluruh **Staff Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS, staf di lingkup FISIP UNHAS dan staf di lingkup Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin** tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu atas bantuannya kepada penulis sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Terimakasih Pengurus **FORMAP FISIP Unhas** yang senantiasa berbagi semangat kepada penulis selama proses penulisan dan masa kuliah.
11. Terimakasih seluruh **Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin** khususnya angkatan Tahun 2022 dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan semoga dengan selesainya pendidikan pada jenjang ini dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan perkembangan ilmu administrasi, serta semoga setelah ini bisa menjadi spirit untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan serta semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin allahummah aamiin.

ABSTRAK

HASRIADI. *Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasangkayu* (dibimbing oleh Thahir Haning dan Hasniati).

Permasalahan *stunting* saat ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah mulai tingkat daerah hingga pusat. Kabupaten Pasangkayu merupakan salah satu daerah yang mempunyai komitmen dalam penanggulangan dan percepatan penurunan *stunting* saat ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kolaborasi dari pemerintah dalam upaya menangani masalah sosial seperti *stunting* di Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan angka *stunting*. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Emerson dengan tiga indikator yaitu prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pasangkayu dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi prinsip bersama berjalan cukup karena terbentuknya TPPS (Tim Percepatan dan Penurunan *Stunting*) berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu No. 20 Tahun 2022 dan rutin melakukan rapat koordinasi. Selanjutnya, dari aspek motivasi Bersama sudah terjalin dengan baik karena tingkat kepercayaan dan pemahaman di antara actor sudah cukup tinggi. Hal ini disebabkan tidak adanya inisiatif sendiri dari lembaga pemerintah dan hanya mengacu pada regulasi yang ada serta tidak adanya ruang dikresi. Dari aspek motivasi bersama sudah cukup efektif karena tingkat kepercayaan dan pemahaman antara aktor sudah cukup tinggi. Selanjutnya, kapasitas untuk melakukan tindakan Bersama sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan angka *stunting* berdasarkan data SSGI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu. Meskipun demikian, tidak ada penetapan secara formal terkait program yang dilakukan bersama di antara setiap actor atau Lembaga pemerintah.

Kata kunci: *collaborative governance*, *stunting*, administrasi



ABSTRACT

HASRIADI. *Collaborative Governance in Preventing Stunting in Pasangkayu Regency* (supervised by Thahir Haning and Hasniati)

The problem of stunting is currently a problem faced by the government, starting from the local government level to the central government. Pasangkayu Regency is one of the regions that has a commitment to tackle and accelerate the current reduction in stunting. The purpose of this research is to analyze the role and collaboration of the government's efforts to deal with social problems such as stunting in Pasangkayu Regency. This research used qualitative method to examine the collaboration among the local governments to reduce stunting rates. The theory used in this study was collaborative governance from Emerson with three indicators, namely shared principles, shared motivation, and capacity for joint action. This research was conducted in Pasangkayu Regency by collecting data from observations, interviews, and documentation. The results of the study show that in terms of joint principles, it is going quite well because of the formation of TPPS (Stunting Acceleration and Reduction Team) based on the Pasangkayu Regency Regent Regulation No. 20 of 2022 and routine coordination meetings. Furthermore, from the aspect of mutual motivation, it has been well established because the level of trust and understanding between actors is quite high. Meanwhile, the capacity to carry out joint action has been running quite well, as indicated by the reduction in stunting rates based on data from SSGI and the Pasangkayu Regency Health Office. However, there is no formal determination regarding programs that are carried out jointly between each actor and government agency.

Keywords: collaborative governance, stunting, administration



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... | iii |
| PRAKATA | iv |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| BAB I Latar Belakang | 14 |
| 1.1 Pendahuluan..... | 14 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 21 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 22 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 22 |
| BAB II Tinjauan Pustaka..... | 24 |
| 2.1. Konsep <i>Governance</i> | 24 |
| 2.2 Konsep <i>Collaborative Governance</i> | 30 |
| 2.2.1 <i>Collaborative/kolaborasi</i> | 30 |
| 2.2.2 <i>Collaborative Governance</i> | 34 |
| 2.2.3 Tujuan <i>Collaborative Governance</i> | 41 |
| 2.2.4 Model <i>Collaborative Governace</i> | 42 |
| 2.2.5 Kriteria Kerberhasilan dan Kegagalan <i>Collaborative Governace</i> . 54 | |
| 2.3 <i>Stunting</i> | 58 |
| 2.4 Penelitian Terdahulu | 61 |
| 2.5 Kerangka Pikir | 68 |
| BAB III Metode penelitian | 70 |
| 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian | 70 |
| 3.2 Fokusi Penelitian..... | 70 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 74 |
| 3.4 Jenis Penelitian | 74 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.5 Informan Penelitian | 75 |
| 3.6 Teknik analisis data..... | 77 |
| 3.7 Teknik pengumpulan data | 79 |
| BAB IV Hasil dan Pembahasan..... | 81 |
| 4.1 Gambaran Objek Penelitian | 81 |
| 4.2 Tim Percepatan dan Penurunan <i>stunting</i> Kabupaten Pasangkayu.... | 87 |
| 4.3 Kondisi Existing Percepatan dan Penurunan <i>Stunting</i> Kabuapten Pasangkayu..... | 93 |
| 4.3.1 Angka Capaian Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Pasangkayu..... | 93 |
| 4.3.2 Program 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Pasangkayu | 96 |
| 4.4 Hasil Penelitian | 100 |
| 4.4.1 Penialian atas variabel Prinsip Bersama dalam <i>collaborrative governance</i> penanggulangan <i>stunting</i> | 101 |
| 4.4.2 Penilaian Motivasi Bersama dalam <i>collaborrative governance</i> penanggulangan <i>stunting</i> | 109 |
| 4.4.3 Penilaian atas Kapasitas untuk Melakukan Tindakan Bersama dalam <i>collaborrative governance</i> penanggulangan <i>stunting</i> | 116 |
| 4.5 Pembahasan Penelitian | 121 |
| 4.5.1 Prinsip Bersama | 121 |
| 4.5.2 Motivasi Bersama | 130 |
| 4.5.3 Kapasitas untuk Melakukan Tindakan Bersama | 140 |
| BAB V Kesimpulan dan Saran | 146 |
| 5.1 Kesimpulan | 146 |
| 5.2 Saran | 148 |
| Daftar Pustaka | 150 |
| Lampiran | 155 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1.1 Pravelensi angka <i>stunting</i> SSGI 2022 | 16 |
| Gambar 1.2 Pravelensi Balita Berdasarkan Provinsi SSGI 2022..... | 17 |
| Gambar 2.1 Tahap Proses CG dan <i>Action Planning</i> | 39 |
| Gambar 2.2 Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell dan Gass (2008) | 43 |
| Gambar 2.3 Model Kerja Kerja interaktif untuk <i>Collaborative Governance</i> , Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012)..... | 46 |
| Gambar Kerangka Pikir..... | 69 |
| Gambar 4.1 Peta Provinsi Sulawesi Barat | 82 |
| Gambar 4.2 Peta Kabupaten Pasangkayu | 85 |
| Gambar 4.3 Struktur Penetapan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Pasangkayu | 89 |
| Gambar 4.4 Hasil Capaian Penurunan <i>Stunting</i> Kab. Pasangkayu 2018-2022 | 141 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 66 |
| Tabel 4.1 Perbandingan Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Per-Kabupaten..... | 83 |
| Tabel 4.2 Data <i>Stunting</i> November 2023 | 95 |
| Tabel 4.3 Penilaian Kinerja 8 Aksi | 97 |
| Tabel 4.4 Reduksi Data Uraian Wawancara Prinsip Bersama..... | 123 |
| Tabel 4.5 Reduksi Data Uraian Wawancara Motivasi Bersama | 131 |
| Tabel 4.6 Reduksi Data Uraian wawancara Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama..... | 143 |

BAB I

PENDAHULUAN

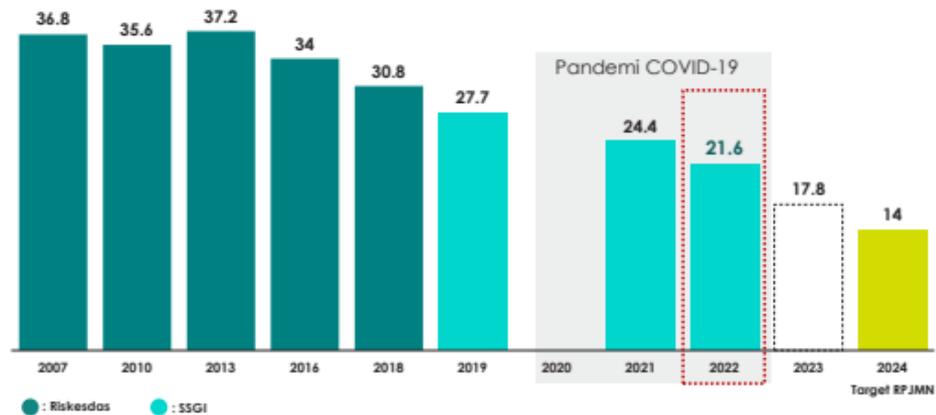
1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif administrasi publik, kolaborasi adalah bentuk kerja sama dimana berbagai pihak yang terlibat bekerja bersama dalam suatu kegiatan dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Pandangan ini sejalan dengan konsep dasar administrasi itu sendiri, yang menggambarkan administrasi sebagai bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan (Noor et al., 2022). Peran kolaborasi dalam administrasi publik, penting untuk memeriksa konsep ini dari berbagai sudut pandang ilmiah (Kurniawati et al., 2023). Pengertian *governance* tidak hanya mencakup keterlibatan lembaga publik dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, melainkan juga merujuk pada kerjasama berbagai organisasi dalam upaya mencapai tujuan-tujuan publik (Noor et al., 2022).

Istilah “tata kelola kolaboratif” mengacu pada wacana dan perbincangan kebijakan yang mendorong upaya partisipatif dalam pencapaian tujuan bersama dalam implementasi kebijakan bersama (Howlett, 2019). Pendekatan *Collaborative Governance* mencakup tiga domain utama: Pemerintah (*government*), masyarakat (*civil society*), dan sektor swasta (*privat*) (Rumihin, 2024). Tata kelola kolaboratif merupakan terminologi yang digunakan untuk menggantikan istilah pemerintah,” yang mengacu pada pemegang otoritas politik, sosial, ekonomi, dan administratif di negara bagian, dengan istilah “tata kelola kolaboratif,” yang mengacu pada kombinasi kekuasaan pemerintahan dalam organisasi (Liu et al., 2021).

Collaborative Governance dilaksanakan dalam beberapa tahap: pertama, tahap baru. proses dalam pemerintahan; kedua, perubahan peraturan; dan ketiga, perubahan peran dan posisi masyarakat secara demokratis (Plattner, 2013). Dalam konteks penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu, *collaborative governance* berperan penting dalam menyatukan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian berbagai pihak untuk mengatasi akar permasalahan *stunting* secara komprehensif dan berkelanjutan (Tobirin et al., 2023).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini adalah terkait penerapan pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam hal pembangunan kesehatan, khususnya dalam menangani masalah percepatan penurunan *stunting* (Kemenkes RI, 2023). *Stunting* merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama (Artika, 2018). Sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak “1000 Hari Pertama Kelahiran” (Kemenkes RI, 2018). Kebijakan pencegahan *stunting* di Indonesia telah diatur dalam beberapa bentuk, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa perbaikan gizi bertujuan untuk memperbaiki pola konsumsi pangan sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran akan perilaku gizi, menjaga kesehatan, dan menjaga kesehatan (Peraturan Perundang-Undangan, 2009).



Gambar 1.1 Pravelensi angka *stunting* SSGI 2022.

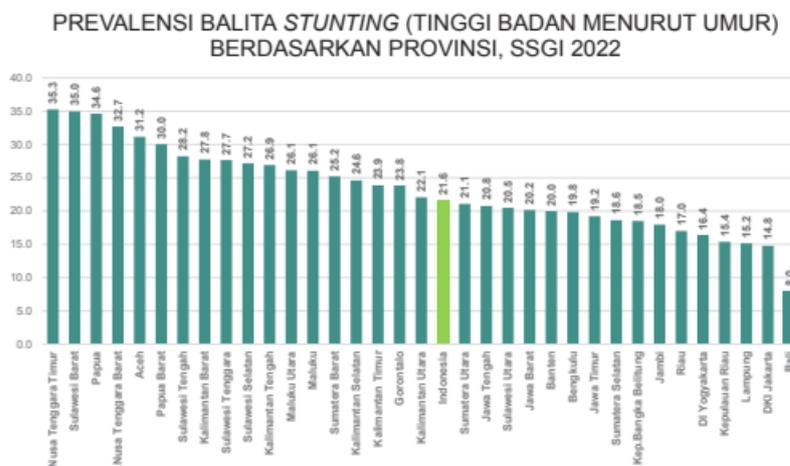
(Sumber : Kemenkes, 2023)

Berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) Masalah *pravelensi stunting* di Indonesia merupakan ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, *prevelensi stunting* di Indonesia mencapai 21,6 %. Artinya, sekitar satu dari 3 anak balita (lebih dari delapan juta anak) di Indonesia mengalami *stunting* (Handayani, 2023). Angka tersebut belum mencapai ambang batas yang ditetapkan *world health organization* (WHO) yaitu 20%. Dengan terhambatnya perkembangan fisik serta kognitif anak, hal ini tentunya akan menurunkan kualitas manusia di suatu Negara (Amri, 2022).

Sebagai bentuk perhatian percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Pada pasal 1 ayat (1), menyebutkan *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Kesehatan (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2021). Peraturan Presiden ini merupakan payung hukum bagi strategi Nasional penurunan *stunting* yang sudah diluncurkan dan dilaksanakan dari tahun 2018. Peraturan Presiden ini pula memperkuat dan wajib dilakukan pada penanganan percepatan penurunan *stunting*.

Stunting berkurang sebesar 2,8 % setiap tahunnya dari 24,4 %, pada tahun 2022 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022, menurut data Kementerian Kesehatan pada Rapat Kerja Nasional BKKBN 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk percepatan dan penurunan *stunting* di Indonesia telah membuahkan hasil yang menjanjikan (Kemenkes RI, 2023).



Gambar 1.2 Pravelensi Balita *Stunting* (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi, SSGI 2022. (Sumber : Kemenkes, 2023)

Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah angka tertinggi kedua penderita *pravelensi stunting* di Indonesia sebanyak 35,0 % Selain peringkat kedua Nasional (Kemenkes, 2023). Ini mengindikasikan bahwa penanganan *stunting* di Sulawesi Barat belum optimal. Dikutip dari berita harian Tribun-

Sulbar.com Kamis 28 September 2023 Wakil Bupati menyatakan bahwa data *stunting* Pasangkayu mencapai 28.6 % di tahun 2021, dan turun menjadi 25.7 % di tahun 2022. "Kita sudah turun 3 persen dan kita targetkan bisa sampai 6 % tahun ini" (Egi Sugianto, 2023).

Pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu mengacu pada Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* (Peraturan Bupati Pasangkayu, 2022). Wakil bupati Pasangkayu yang juga selaku ketua tim percepatan dan penurunan *stunting* (TPPS) dan juga pemimpin kegiatan rembuk *stunting* menyampaikan bahwa "Rembuk *stunting* ini menjadi dasar gerakan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu melalui integrasi program yang dilakukan antar sektor stakeholder selaku penanggung jawab layanan, juga antar program dan partisipasi masyarakat". Melalui rembuk *stunting* ini, Wakil Bupati berharap agar semua pihak bisa berperan aktif dalam membantu percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu. (Mulyawan, 2023).

Keterlibatan pemerintah daerah sebagai motor utama dalam kolaborasi ini memegang peran sentral. Mereka memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, alokasi anggaran, dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan dalam upaya penanggulangan *stunting*. Dalam indikator keberhasilan Pencapaian Kesehatan atau SDGS (*Sustainable Development Goals*) salah satu indikatornya yaitu status gizi anak balita (Beal et al., 2018). Dengan membangun kesadaran tentang pentingnya nutrisi yang seimbang dan kesehatan anak sejak dini, masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka sendiri (Moerad et

al., 2019). Melalui program-program pelatihan dan partisipasi aktif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan terkait gizi dan kesehatan, masyarakat dapat menjadi mitra yang kuat dalam memastikan keberlanjutan upaya menurunkan *stunting* (Chandra et al., 2021).

Terdapat faktor yang menjadi penghambat dari adanya kasus ini disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang masih terpuruk (Mustika, 2018). Penyebab gizi buruk saat hamil juga bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang masih terpuruk (Suryani, 2017). Pada tingkat masyarakat, faktor-faktor seperti kebersihan, ketahanan pangan keluarga, pola asuh anak dan pelayanan kesehatan dasar sangat penting untuk pembinaan anak yang kekurangan nutrisi (Islam et al., 2020). Pada level makro, diperlukan kekuatan kebijakan, strategi, regulasi dan koordinasi antar sektor serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi isu-isu seperti pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan (Svefors et al., 2020). Inilah yang tidak secara langsung akan mengubah budaya dan paradigma miskin di tingkat rendah terkait dengan perawatan gizi bagi keluarga, termasuk anak-anak (Leroy & Frongillo, 2019).

Namun, dari hasil observasi awal dan data empiris lapangan laporan hasil evaluasi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* Sulawesi Barat tahun 2023 dimana di dalamnya termasuk wilayah Kabupaten Pasangkayu yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa pelaksanaan *Collaborative Governance* belum sepenuhnya terkoordinasi dan maksimal dari berbagai *stakeholder* seperti; Tim Percepatan dan Penurunan *stunting* (TPPS), OPD yang terkait, dan pihak lainnya. Karena dalam melibatkan

banyak sektor organisasi dalam upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu menggambarkan belum adanya komitmen untuk berkolaborasi dalam percepatan pencapaian penanganan penanggulangan *stunting*. Hal ini mengakibatkan adanya tumpang tindih dan duplikasi dalam program kegiatan *stakeholder* antar unit kinerja daerah yang berimbas pada sumber daya terbuang (pemborosan anggaran) dan kurangnya keterlibatan aktor-aktor penting.

Mengacu dalam kerangka konsep "*collaborative governance*," dilakukan upaya untuk menggabungkan semua *stakeholder*, termasuk pemerintah dan non-pemerintah, dengan tujuan mengelola dan mengatur suatu masalah bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik (Sørensen & Torfing, 2021). Pada hakikatnya akhir dari dinamika kolaborasi adalah baik tidaknya ditentukan oleh ke tiga komponen ini saling berinteraksi dalam suatu dinamika yang kompleks. Sehingga analisis ini fokus pada indikator dinamika kolaborasi merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan *collaborative governance* (Emerson et al., 2012a). Seberapa baik kerjasama di implementasikan dapat dilihat secara efektif antar *stakeholder*, termasuk prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (Emerson et al., 2012a). Keseimbangan dan sinergi antara ketiga komponen ini menjadi kunci bagi keberhasilan kolaborasi yang efektif. Selanjutnya Tindakan kolaborasi dimana tindakan-tindakan kolaborasi melibatkan serangkaian langkah konkrit yang diambil oleh individu atau kelompok untuk bekerja bersama dengan efektif (Richit et al., 2021). *Stakeholder* harus mengambil berbagai tindakan kolaborasi yang dilakukan dalam kerjasama tim dan organisasi, serta bagaimana tindakan-tindakan ini

mempengaruhi hasil kerja bersama (Levina, 2005). Maka dalam usaha penanggulangan *pravelensi stunting*, penting untuk memahami dampak dari kolaborasi *antar stakeholder* dan bagaimana kolaborasi lintas sektor dan adaptasi dapat berkontribusi pada penanggulangan *stunting* yang lebih efektif (Supriyanto & Jannah, 2022).

Collaborative Governace dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu harus menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai *stakeholder* termasuk non-pemerintah. Dalam analisis ini akan mengkaji *Collaborative Governance* dalam penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Pasangkayu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya menggubakan pendekatan *collaborative governance* dengan mengacu pada dinamika *collaborative* yang kokoh, diharapkan bahwa upaya menanggulangi *stunting* di Daerah Pasangkayu dapat menjadi contoh maka yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana prinsip bersama *stakeholder* dalam Penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu?
- b) Bagaimana motivasi bersama antar *stakeholder* dalam Penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu?
- c) Bagaimana kapasitas untuk melakukan tindakan bersama antar *stakeholder* dalam Penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan umum dari penelitian yakni untuk mendeksripsikan dan menganalisis pemahaman *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Pasangkayu.

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini yakni:

- a) Untuk menganalisis prinsip bersama *stakeholder* dalam Penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu.
- b) Untuk menganalisis motivasi bersama antar *stakeholder* dalam Penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu.
- c) Menganalisis kapasitas untuk melakukan tindakan bersama antar *stakeholder* dalam Penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu:

- a) Secara Akademisi

Memberikan masukan dalam rangka ilmu pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Publik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran tentang *Collaborative Governance*

- b) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah pada umumnya berkaitan dengan penanggulangan stunting dengan konsep *Collaborative Governance*.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Governance

Konsep "*governance*" sering digunakan sebagai pengganti istilah "administrasi publik" atau paling tidak merujuk pada konsep yang memiliki kesamaan dalam banyak konteks (Lan dan Rosenbloom, 1992; Peters dan Savoie, 1995; Salamon, 1989). Istilah "*governance*" sebagai bentuk kata ganti dari "*government*", pemahaman ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa "*governance*" bukanlah sinonim dari "*government*". Lanjut (dwiyanto, 2018) bahwa Konsep "*governance*" menitik beratkan pada pentingnya melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas tantangan dan masalah yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Pada intinya, "*governance*" melibatkan kerja sama antara berbagai pihak dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kerja sama ini mencakup partisipasi penduduk setempat, organisasi masyarakat, sektor publik, dan juga swasta (Gibson, 2011).

Menurut (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2004) "*governance*" diartikan sebagai sejumlah interaksi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks perumusan program-program dari proses kebijakan publik, implementasinya, hingga evaluasi kebijakan untuk menilai keberhasilan program yang telah dijalankan (Noor et al., 2022).

Governance sebagai "sarana untuk mengarahkan proses yang mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sektor swasta, publik, dan sipil" Lebih khusus lagi, tata kelola adalah "serangkaian kegiatan koordinasi

dan pemantauan” yang memungkinkan kelangsungan kemitraan atau lembaga kolaboratif (Emerson et al., 2012a). *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Terdapat tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Obi, 2007). Istilah ini digunakan pertama kali di Perancis pada abad ke-19 pada masa pemerintahan Henry IV pada tahun 1399. Pada saat itu, *governance* dipahami sebagai "pemerintah pusat (Emerson & Nabatchi, 2015).

Menurut (Chhotray et al., 2009) mengartikan *governance* sebagai permainan untuk pengambilan keputusan kolektif dalam lingkungan di mana terdapat banyak aktor dan organisasi tanpa sistem kontrol formal yang dapat mengarahkan pola dari hubungan antara aktor dan organisasi.

Dari konsep diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *governance* memiliki implikasi yang luas, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi swasta, maupun sektor nirlaba. Ini mencerminkan pergeseran dari pandangan klasik yang berfokus pada kendali dan hierarki, menuju pendekatan yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan.

Dalam konteks relokasi *administrative* (Frederickson, 2005), *governance* diartikan dalam empat pengertian:

- a. Tata kelola mengacu pada koalisi banyak organisasi atau lembaga pemerintah dan swasta yang saling terkait untuk melaksanakan kegiatan publik. Mereka bekerja sama dalam jaringan lintas negara. Oleh karena itu, istilah pemerintahan pertama ini mengacu pada interkoneksi banyak entitas independen dan kekuatan otonom.

- b. Pemerintahan sebagai tempat berkumpulnya sejumlah besar pemangku kepentingan, dan kadang-kadang disebut sebagai hypermultiple untuk mengatur konser antara aktor-aktor yang terhubung secara langsung atau tidak langsung (*stakeholders*): partai politik, badan legislatif dan departemennya. Mengelompokkan kepentingan dan mengembangkan pilihan politik untuk menerapkan pada waktu yang sama. yang paling urgen dalam konteks ini adalah fungsi kontrol antar organisasi mulai menyatu dengan pusat kekuasaan dari banyak aktor, dan pusat pengambilan keputusan yang semakin independen menjadi semakin diberdayakan. Oleh karena itu, istilah ini menitik beratkan governance dalam konteks multi aktor dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Beberapa pertanyaan penting adalah sejauh mana Komunitas yang terlibat, cakupan komunitas yang terlibat dalam proses implementasi proses penyaluran inisiatif dan kreativitas komunitas, sejauh mana komunitas memiliki akses terhadap informasi tentang implementasi kebijakan, dan seberapa memuaskan hasil kebijakan diimbangi dengan tanggungjawab bisa lakukan. Kata kunci untuk periode kedua ini adalah multipartai, peningkatan kekuasaan, serta pembuatan dan melaksanakan kebijakan bersama.
- c. *Governance* mengacu pada kecenderungan *trend* saat ini dalam kajian manajemen publik umumnya spesialis dalam kelompok kebijakan publik, di mana relasi antar organisasi antar aktor-aktor kunci turut serta dalam pelaksanaan kebijakan Bekerja dengan pihak yang lebih politis, lebih kreatif, dan lebih berdaya tidak mencerminkan karakter yang kaku, terutama dalam hal organisasi, hierarki, aturan, dan regulasi. Dalam arti,

pemerintahan adalah jaringan kinerja lintas organisasi vertikal dan horizontal untuk mencapai tujuan publik. Istilah *governance* dalam kajian administrasi sarat dengan nilai-nilai publik. Tata kelola berarti sangat penting. Generasi berarti beberapa tingkat kesenangan. *Governance* adalah sesuatu yang lebih bermartabat dan positif dalam mencapai tujuan publik. Konsep pemerintahan dan birokrasi diremehkan, tetapi meremehkan mencerminkan sesuatu yang tidak cukup kreatif. Lebih aktif, lebih responsif, semuanya lebih baik.

Governance mempunyai empat unsur dasar (Peters & Pierre, 2006), yaitu:

- a. Dominasi jaringan (*the domination of network*) didalam kebijakan formal, pemerintahan didominasi oleh stakeholders, hal ini menyangkut bagaimana barang dan jasa publik akan dihasilkan.
- b. Fungsi negara yang semakin kecil dalam. Meskipun Negara tidak lagi melakukan pengawasan atas kebijakan publik namun masih punya pengaruh untuk mempengaruhi kebijakan tersebut. Kekuatan negara ini dihubungkan dengan kemampuannya untuk bernegosiasi dengan para *stakeholders* dalam jaringan kebijakan.
- c. Menyatukan sumber daya (*the blending of public and private resources*) *stakeholders* melakukan kerja sama dalam memperoleh dukungan sumber daya yang tidak mereka miliki. Sebagai contoh, Dengan melibatkan sektor swasta dalam melaksanakan kebijakan, pemerintah dapat terhindar dari

beberapa masalah prosedural dan pertanggungjawaban yang mahal dan waktu yang lama. Privat dapat bernegosiasi dengan pemerintah untuk mendanai proyek yang layak, tetapi kecil kemungkinannya hanya sektor swasta yang akan mendanainya.

- d. Penggunaan beberapa perangkat, ada keinginan untuk tumbuh dan mengembangkan dan menerapkan metode modern untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan publik.

Secara komprehensif aspek-aspek *governance* berdasarkan teori, praktik, dan persoalan yang dihadapi oleh konsep ini. Bevir merinci Teori *governance* dan beberapa praktik tata kelola pemerintah menggunakan Prinsip Tata Kelola. Sebagai aturan, teori *governance* muncul dari kendala pemerintah pada pengelolaan dana publik dan membutuhkan dukungan dari sektor privat dan masyarakat. Inilah yang dikatakan Bevir sebagai organisasi multi stakeholders (Bevir, 2010).

Sebelumnya (Bevir, 2010) menyebut *governance* adalah perubahan sistem tata pemerintahan yang meliputi:

- a) Transformasi dan sistem hierarki dan pasar menjadi sistem *network* dan kolaborasi;
- b) Membangun jaringan administrasi negara dengan masyarakat sipil;
- c) Transformasi sistem administrasi yang mempercayakan intervensi dan pengawasan menjadi petunjuk dan koordinasi;

- d) Mengubah kegiatan pemerintahan dari mengatur dan memerintah ke tawar-menawar dan diplomasi:
- e) Melibatkan stakeholders non-negara dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik.

(Smith, 2007) mengutarakan bahwa studi *governance* memiliki dua aliran utama, yaitu:

- a. Kelembagaan (*institutionalism*), aturan struktural inembentuk perilaku dalam sebuah hubungan organisasi, menentukan kinerja dari sebuah hubungan organisasi dan strukturya dengan aktor - aktor eksternal
- b. Jaringan (*Network*), peran berbagai aktor dalam jaringan negosiasi, implemennisi, dan penyampaian.

Dalam struktur jaringan bisa saja semua pihak berada pada posisi seimbang atau bisa saja satu pihak atau lebih beberapa mengambil peran pemimpin (Sepriano et al., 2023). Jika melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan istilah *governance* berbeda dengan istilah *Government*. Dengan adanya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance*, mencerminkan kesediaan pemerintah untuk mendorong perubahan pemerintahan melalui implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal ini nenunjukkan perkembangan dan perubahan paradigma dalam memandang pemerintahan.

2.2 Konsep *Collaborative Governance*

2.2.1 Kolaborasi/*Collaborative*

Dari segi perspektif administrasi publik, kolaborasi adalah kerja secara bersama atau bisa dikatakan bekerja bersama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan (Naufal et al., 2023). Hal ini tentu pula sependapat dengan pengertian dari administrasi itu sendiri, administrasi merupakan suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan (Mahsuni et al., 2024). Kajian kolaborasi dalam pandangan administrasi publik juga dapat ditelusuri dalam tataran model administrasi negara baru, yaitu pilihan publik (Sagena et al., 2023). Frederickson (1984) mengungkapkan bahwa sistem pemberian pelayanan kepada publik (*delivery service system*) adalah salah satu pusat perhatian dan menjadi nilai yang akan dimaksimalkan. Bertitik tolak dari perkembangan keilmuan tersebut muncul berbagai kajian untuk mereformasi sektor publik dengan mempergunakan pendekatan *New Public Management*, pendekatan yang mengarah kepada penerapan prinsip-prinsip *New Public Management* dalam bidang pemerintahan (Noor et al., 2022).

Dalam administrasi publik konsep *governance* didefinisikan sebagai sebagai seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, peran-peran dan prosedur pengambilan keputusan, di mana para aktor (manajer) terpusat dalam arena kebijakan publik (Bovaird & Löffler, 2023). Secara jelas, defenisi *governance* diambil dari teori rezim internasional dan diterapkan dalam administrasi publik (Ngambut, 2023). Berdasarkan hal tersebut teori *governance* menunjukkan tiga hal

pokok: (1) perpaduan vertikal dan horizontal inyuridsional dan interorganisasi, (2) perluasan negara atau yuridiksi berdasarkan kontrak atau grant (hibah) ke pihak ketiga, termasuk *government*, dan (3) bentuk-bentuk pengambilan kebijakan *non-yuridksional* atau *non-governmental* publik dan implementasi (Noor et al., 2022).

Menurut Denhardt dan Denhardt, (2003) Istilah kolaborasi sering digunakan dalam proses kerja sama antar aktor yang tidak lagi terobsesi dengan organisasi yang rasional dan *hierarkis*. Penggunaan istilah *collaborative* telah digunakan dalam tata kelola dan manajemen kebijakan publik sejak paradigma beralih dari *government* ke *governance* (Satibi, 2023). Pergeseran paradigma ini juga tidak bisa dilepaskan dari paradigma pemerintahan dari negara “penjaga malam” ke negara kesejahteraan, paradigma politik yang menekankan interaksi kepentingan aktor, dan paradigma administrasi yang dikenal dengan istilah *Old Public Administration* (OPA) bergeser ke paradigma *New public Management* (NPM). Paradigma OPA masih menyadari pengaruh politik, terpusat, memiliki peran terbatas bagi manajer dalam pengambilan kebijakan, dan menempatkan efisiensi dan rasionalitas pada nilai-nilai inti organisasi. Oleh karena itu, paradigma OPA secara umum dianggap tidak mampu menahan perubahan yang cepat di masyarakat (Thoha, 2008).

Dalam perkembangan paradigma administrasi publik menurut Keban interaksi antar aktor (masyarakat, pemerintah dan sektor swasta) disebut dengan *governance* (Keban, 2008) dalam (Noor et al., 2022). Menurut Thoha dalam paradigma *governance* ini, orientasi administrasi

publik yang menekankan adanya peranan rakyat, oleh karenanya untuk mencapai tata pemerintahan yang baik perlu adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling kontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yaitu pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan (business) yang berada sektor swasta (Thoha, 2008).

Secara umum, kerjasama memiliki dua pengertian yaitu, kolaborasi dalam arti proses dan normatif. Kolaborasi dari perspektif proses adalah seperangkat proses atau metode organisasi atau pengaturan (Ansell & Gash, 2008). Dalam pengertian ini, banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah terlibat secara proporsional sesuai dengan kepentingan dan tujuan mereka. Di sisi lain, dalam arti normatif, adalah keinginan atau tujuan filosofis pemerintah untuk berinteraksi dengan mitranya.

Lanjut Smith (1998, 61), berpendapat bahwa *collaborative* melibatkan "representasi kelompok kepentingan utama." Connick dan Innes (2003, 180) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai mencakup "perwakilan dari semua kepentingan yang relevan." Reilly (1998, 115) menggambarkan upaya kolaboratif sebagai suatu jenis penyelesaian masalah yang melibatkan "upaya bersama antara lembaga-lembaga pemerintah dan warga negara yang peduli" dalam (Ansell & Gash, 2008).

Collaborative sebagai sarana untuk mengintegrasikan perspektif yang berbeda untuk menciptakan solusi bersama. Menurut

Teasley, (2017) bahwa kolaborasi sebagai "terkoordinasi, aktivitas sinkron berupa hasil dari upaya lanjutan untuk membangun dan mempertahankan konsepsi bersama dari suatu masalah". Mereka mendefinisikan masalah bersama sebagai struktur pengetahuan yang mendukung pemecahan masalah dengan mengintegrasikan tujuan, deskripsi masalah yang dihadapi, dan kesadaran akan strategi potensial (Uci Angraini, 2021).

Perspektif *Collaborative* yang dikemukakan (Agranoff dan McGuire 2003) adalah suatu korelasi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan memberikan solusi dalam keterbatasan informasi, waktu, ruang, dan sebagainya.

Menurut Roderick Arthur William Rhodes (1996) menyatakan bahwa *governance* merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a changed condition ordered rule*), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*) (Astuti, 2020).

Dari berbagai perspektif di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kolaborasi adalah pendekatan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan berbagai pihak yang bekerja bersama-sama. Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, kolaborasi menjadi semakin penting untuk mengatasi problematika masalah dan mencapai hasil yang lebih baik.

2.2.2 Collaborative Governance

Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2008).

Collaborative governance merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi *stakeholder* dalam urusan-urusan publik. Ada karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi kolaborasi (Silvia, 2011). Kolaborasi dimaknai berbeda dari jaringan (*network*) dan kemitraan (*partnership*). Menurut (Ansell & Gash, 2008) jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang lingkupnya lebih plural, informal dan implicit. Kemitraan digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang lebih berorientasi pada koordinasi daripada konsensus dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan.

Collaborative governance merupakan kegiatan atau strategi dalam ranah publik yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijakan atau program (Wang & Ran, 2023). Lanjut menurut Neta Sher-Hadar, and Itzhak Galnoor, (2020) Meningkatnya minat

terhadap mekanisme *collaborative governance* bersumber dari potensi manfaat melibatkan berbagai aktor untuk menangani masalah kapasitas dan legitimasi pemerintahan. Collaborative governance menawarkan strategi tata kelola yang berbeda dari privatisasi dan regulasi, yang telah digunakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah (Noor et al., 2022).

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2008). Ini adalah proses di mana pemangku kepentingan yang terlibat dengan semua sektor membuat solusi yang efisien dan efektif untuk masalah publik yang melampaui yang dapat dicapai oleh organisasi mana pun sendirian.

Akibatnya, tujuan utama dari proses *collaborative governance* dapat menghasilkan warga yang lebih terinformasi dan lebih terlibat, peserta yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan, lebih banyak pemangku kepentingan dalam kemitraan masyarakat, metode musyawarah (*deliberative*) yang lebih baik, dan akuntabilitas dan kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah, (Noor et al., 2022).

Ada enam komponen yang menjadi fokus *collaborative governance* menurut. Pertama, forum dari badan publik. Kedua, aktor

non-pemerintah harus menjadi salah satu peserta forum. Ketiga, peserta dilibatkan secara langsung dalam perancangan/pembuatan. Keempat, forum diatur secara formal dan secara kolektif. Kelima, bertujuan untuk mencapai keputusan yang di ambil berdasarkan mufakat dan. Keenam, berfokus pada kerjasama pada kebijakan atau administrasi publik, (Ansell & Gash, 2008).

Donahue dan Zeckhauser menjelaskan bahwa dalam *collaborative governance* menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor agar suatu kebijakan yang hendak dihasilkan akan berdampak kepada kepentingan publik (*Public Interest*) dan menciptakan nilai publik (public values) terhadap keberlanjutan. Dalam *collaborative governance* Donahue dan Zeckhauser menambahkan penjelasan bahwa etika berkolaborasi harus menjaga sistem interaksi yang tidak merugikan salah satu aktor yang terlibat (Meier, 2011). *Collaborative governance* merupakan kondisi saling ketergantungan antar aktor (Rahmawati & Hertati, 2023). Karena para *stakeholders* menyadari kekurangan mereka, ada keinginan untuk melakukan *collaborative*. Kedua, aktor-aktor tersebut perlu mengungkapkan keinginan dan kemauannya untuk membangun korelasi yang lebih dekat dengan aktor-aktor lain. Setiap pihak yang terlibat harus menyadari legitimasi dari pihak lainnya. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu membangun rasa kepemilikan bersama terhadap setiap proses kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008). *Collaborative governance* juga dapat diartikan sebagai

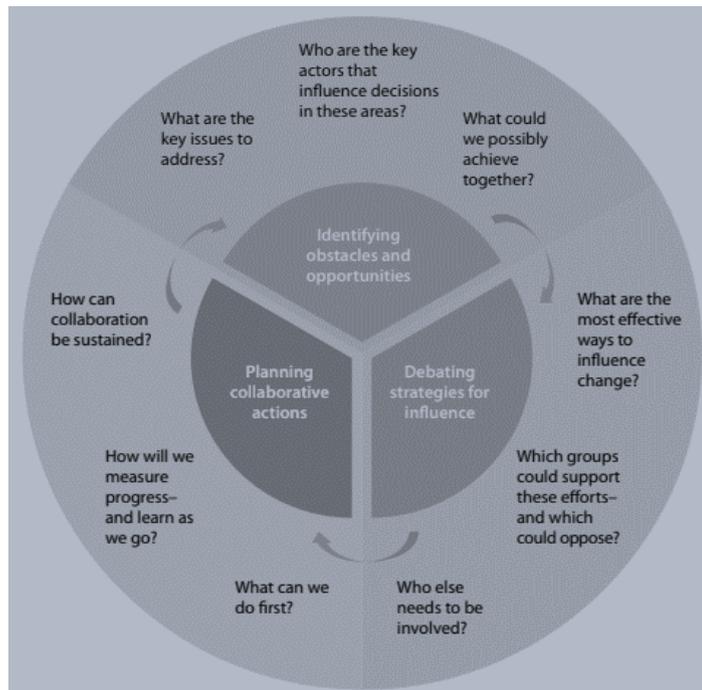
suatu bentuk hubungan kerja sama antar pemerintah dan *stakeholders* (Ariesmansyah et al., 2023).

Collaborative governance adalah sebuah pelaksanaan terstruktur dalam sebuah perumusan kebijakan publik yang dilakukan secara kolektif yang melibatkan aktor di luar kelembagaan pemerintah (Emerson et al., 2012). Penjabaran teori *collaborative governance* merupakan bagian dari pengembangan komposisi kolaborasi, di mana partisipasi aktor eksternal saling bercermin untuk menemukan titik terang dalam proses perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan untuk mencapai program pembangunan. Keberhasilan menangani permasalahan masyarakat melalui kolaborasi dalam pengelolaan menjadi esensial, karena alasan ini, (Ansell & Gash, 2008), memaparkan enam aspek inti dalam teori pengelolaan kolaboratif, yakni (1) keberadaan wadah yang sebagian memiliki tanggung jawab di lembaga publik, (2) partisipasi pelaku kebijakan di luar lingkup pemerintahan, (3) keterlibatan aktif pelaku non-pemerintah dalam proses kebijakan yang bukan hanya formalitas atau sekadar konsultasi, tetapi juga melibatkan komunikasi efektif dalam proses kolaborasi, (4) pengaturan waktu selama proses kolaborasi, (5) pembuatan kebijakan berdasarkan konsensus, (6) fokus kolaborasi pada perumusan kebijakan dan program publik guna mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran atau harapan masyarakat (Ansell & Gash, 2008). Menurut (Choi dan Robertson 2014), *collaborative governance* merupakan proses kolektif dan elastis di mana setiap peserta memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang penting dan

semua peserta mempunyai peluang yang sama untuk mempertimbangkan upaya mereka dalam proses tersebut.

Kemudian, Silvia memberikan pernyataan bahwa signifikansi dari karakteristik atau atribut khusus yang dimiliki oleh pelaku dalam menjalankan *collaborative governance* (Silvia, 2011). Pada sisi lain, Goliday juga berpendapat bahwa definisi kolaborasi pemerintah perlu memberikan wewenang kepada pelaku non-pemerintah untuk mencapai kesepakatan bersama (Goliday, 2012). Dalam pandangan Bevir, proses kolaborasi terwujud saat pelaku pemerintah dan non-pemerintah bersama-sama mengambil keputusan terkait isu publik. Dalam kerangka ini, setiap pelaku harus aktif dalam menjalankan peran yang telah ditetapkan dalam proses kolaborasi (Bevir, 2009). Hal ini ditegaskan pula oleh Ansell dan Gash bahwa kolaborasi antara pelaku kebijakan publik menggambarkan kerjasama yang memiliki dasar hukum untuk memastikan bahwa prosesnya menghasilkan akurasi dan mendorong tindakan kolektif dalam merumuskan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008).

Collaborative governance memiliki tiga tahapan yang mewakili proses *collaborative* menurut (Ratner, 2012), dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1. Tahap Proses *Collaborative governance* dan *Action Planning* (Ratner, 2012).

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat diketahui tiga tahap tersebut meliputi:

1. *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Pada fase ini, para pejabat pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin timbul selama proses pengelolaan bersama. Pada tahap ini, setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi menjelaskan isu yang dihadapi, dan para pemangku kepentingan lain memberikan perhatian kepada setiap isu yang diuraikan oleh masing-masing pihak terkait. Selanjutnya, mereka mempertimbangkan opsi untuk mengatasi setiap masalah yang teridentifikasi seperti berikut: Solusi atas setiap permasalahan yang muncul

didefinisikan oleh para pemangku kepentingan, dan setiap pihak memiliki kewenangan yang setara dalam menetapkan pedoman untuk menangani setiap isu yang diidentifikasi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan peluang yang terkait dengan hasil yang dapat dicapai oleh para pemangku kepentingan yang terlibat. Pada dasarnya, tahap ini adalah saat para pihak saling memperhatikan mengenai masalah atau hambatan yang perlu didiskusikan oleh setiap pemangku kepentingan.

2. *Debating Strategies For Influence* (Fase Dialog)

Dalam fase ini, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan atau pembuatan kebijakan mengkaji atau berdiskusi mengenai hambatan yang telah diidentifikasi pada tahap awal. Para aktor yang terlibat dalam kolaborasi terlibat dalam dialog yang melibatkan diskusi tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan mengenai pelaku-pelaku yang mungkin dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Setelah tahap mendengarkan permasalahan yang muncul dalam proses kerjasama dan merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut, bagian selanjutnya melibatkan para aktor kolaborasi atau pembuat

kebijakan yang relevan dalam langkah-langkah sebelumnya. Pada titik ini, dilakukan identifikasi metrik untuk mengukur setiap langkah yang dijalankan dan diatur langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan proses kolaborasi dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraikan, *collaborative governance* adalah sebuah pendekatan dan sistem dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang beragam, baik dari pemerintahan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil (Firman & Rahmawati, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan publik secara lebih efektif. Dalam konteks ini, kerjasama menghasilkan interaksi yang merata di antara semua pelaku. Semua aktor berada pada posisi yang setara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Tujuan *Collaborative governance*

Keberadaan *collaborative governance* menjadi solusi terhadap berbagai tantangan dalam hal masalah publik yang semakin kompleks, kesulitan dalam implementasi, biaya yang tinggi, dan politisasi regulasi di sektor publik (Saifuddin, 2021). Keterbatasan sumber daya dan konektivitas telah mendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang beragam guna mengatasi permasalahan ini. Secara ringkas, tata kelola *collaborative* dapat diartikan sebagai usaha untuk mengelola manajemen secara efektif

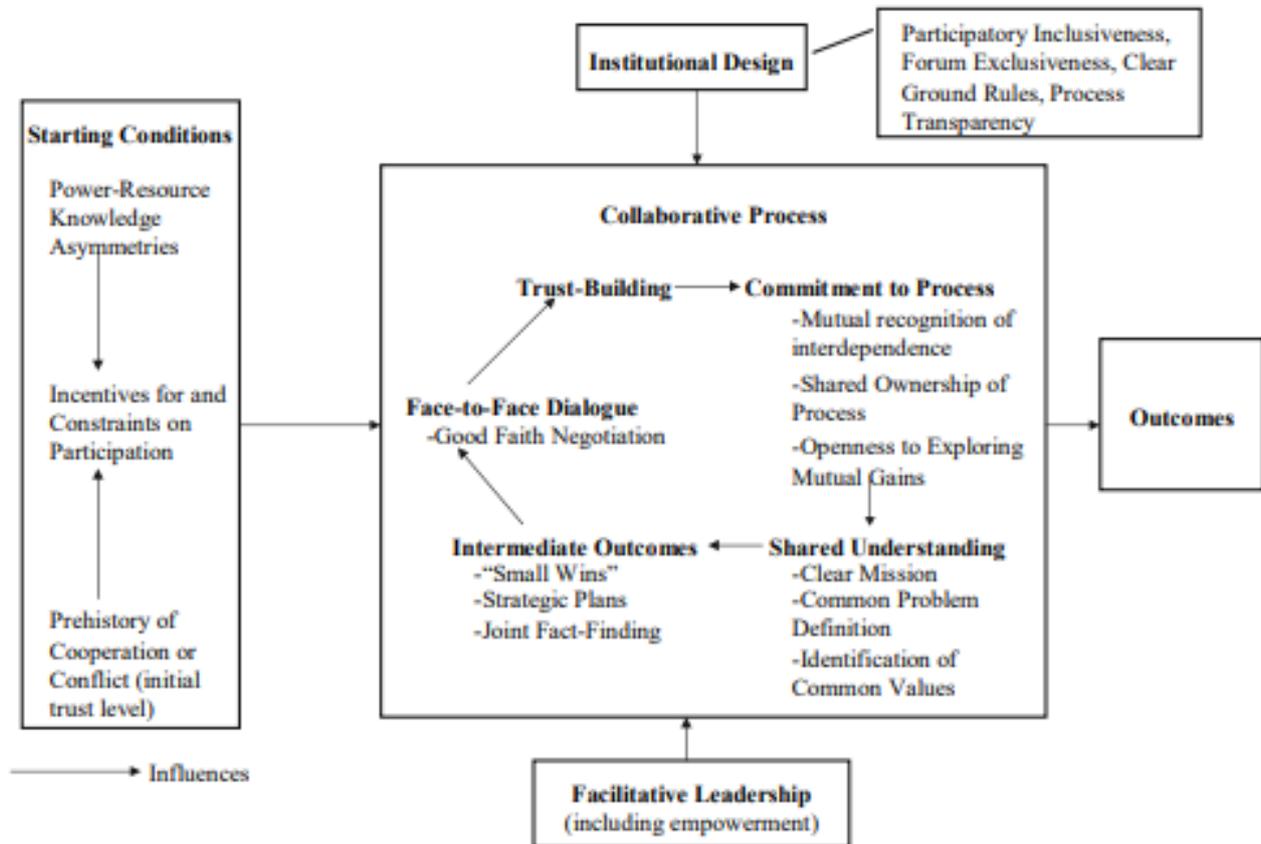
dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola. Secara umum, bentuk pemerintahan melibatkan negara, sektor swasta, dan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Dalam konteks Administrasi Publik, (Ansell & Gash, 2008) mengusulkan bahwa *Collaborative governance* merupakan sebuah paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan yang mendorong berbagai pembuat kebijakan berpartisipasi dalam satu wadah dan mencapai kesepakatan bersama.

2.2.4 Model Collaborasi Governance

a. Model Collaborative governance Ansell dan Gash

Model tata kelola kolaboratif yang paling terkenal adalah model yang ditawarkan oleh (Ansell & Gash, 2008), yang dapat digunakan sebagai panduan penelitian untuk memverifikasi efektivitas proses kolaborasi yang sedang berlangsung. Model Tata Kelola Kolaboratif yang dikembangkan oleh Ansell & Gash ini mengacu pada strategi formal untuk menggabungkan pemangku kepentingan dalam sebuah kolaborasi, yang bertujuan mencapai sebuah konsensus di antara para pemangku kepentingan tersebut.

Model ini menggunakan 4 (empat) variabel utama, yakni: terdiri dari: (1) kondisi awal; (2). desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008).



Gambar 2.2. Model Collaborative governance (Ansell dan Gash 2008)

Berdasarkan apa yang telah dikembangkan oleh Ansell dan Gash mengenai model kerangka kerja proses collaborative governance, tergambar dalam bagian 2.2 di atas, terdiri dari empat tahapan utama, yaitu:

1. Tahap "*Starting Condition*" (Kondisi Awal): Tahap ini berkaitan dengan penjelasan mengenai dua isu penting, yaitu ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dan insentif untuk mendorong partisipasi. Jika terdapat ketidakseimbangan dalam hal sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap pemangku

kepentingan, maka kemungkinan kerjasama akan dimanipulasi oleh mereka yang memiliki sumber daya dan kekuatan lebih besar. Oleh karena itu, jika kondisi ini terjadi, perlu adanya komitmen untuk membantu pemangku kepentingan yang kurang berdaya. Selain itu, penting juga untuk menciptakan insentif yang mendorong pemangku kepentingan yang lebih lemah untuk tetap aktif dalam kerjasama. Terakhir, perlu adanya langkah antisipasi terhadap potensi konflik di dalam kerjasama, sehingga pada tahap awal harus dibangun rasa saling percaya antara semua pihak yang terlibat.

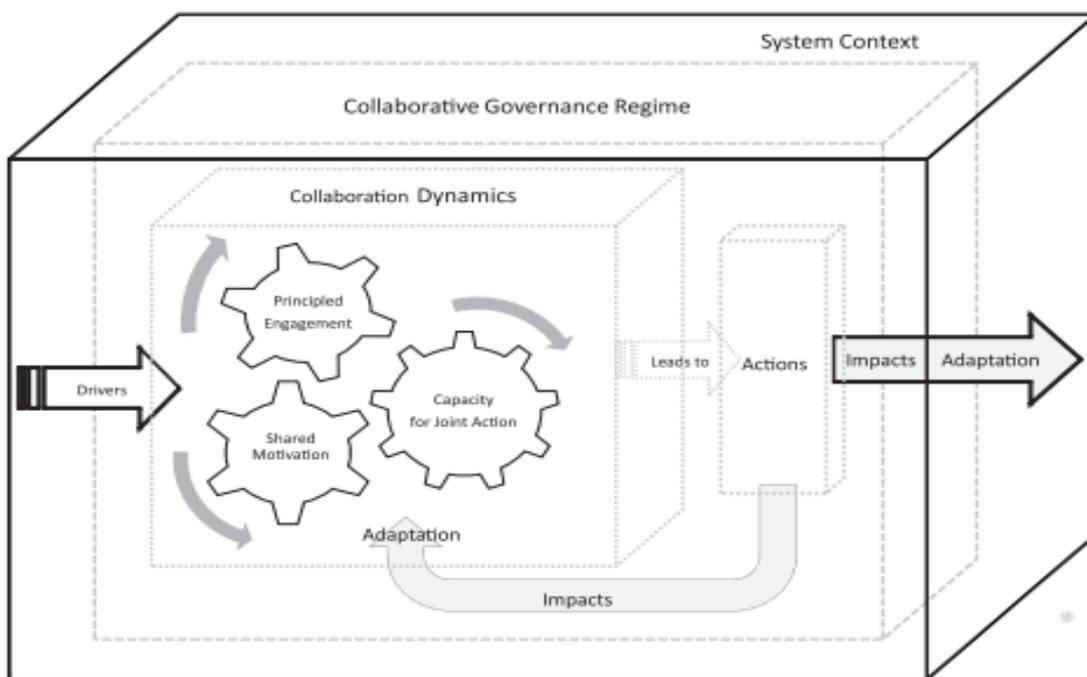
2. Dalam konteks kepemimpinan yang memfasilitasi atau "*facilitative leadership*," Ansell dan Gash menjelaskan bahwa dalam tahapan proses kolaborasi, diperlukan fungsi kepemimpinan yang memiliki aspek fasilitatif. Hal ini dikarenakan fungsi kepemimpinan yang dapat memfasilitasi berbagai hal. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga stabilitas interaksi antara semua aktor yang terlibat, memelihara saling kepercayaan di antara para aktor, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan di antara para aktor tersebut. Selain itu, kepemimpinan yang memfasilitasi juga bertugas untuk mengatur dan mengelola forum diskusi sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dengan efektif.
3. *Institutional design* adalah aturan main yang sangat fundamental di dalam proses kerjasama dan sifat dari institusi tersebut haruslah terbuka.

4. Dalam proses kolaboratif, ada pendekatan bahwa tahap awal dimulai dengan pembukaan forum dialog tatap muka yang melibatkan berbagai pihak dalam mencapai kesepakatan bersama. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun saling kepercayaan di antara para aktor yang terlibat dan mendorong tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman bersama. Setelah tahap ini tercapai, tujuan akhir dari kolaborasi adalah mencapai pencerahan atau solusi dari masalah yang dihadapi (Ansell & Gash, 2008).
5. *Intermediate Outcomes* atau hasil-hasil perantara dalam proses kolaborasi dianggap berhasil ketika serangkaian kegiatan bersama telah dilakukan secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama terjadi, dan pencapaian ini dilakukan dengan cara yang lebih efektif daripada alternatif lainnya. Proses ini terus berlanjut mengikuti jalur kolaborasi yang telah disetujui. Meskipun hasil-hasil perantara telah menjadi nyata, penting untuk diingat bahwa dampak yang dihasilkan dari proses tersebut adalah inti untuk membangun momentum yang memandu keberhasilan kolaborasi. Hasil-hasil perantara ini tidak boleh dianggap sebagai hasil akhir dari kolaborasi.

b. Model Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

Kirk Emerson dan timnya mengajukan bahwa proses kerjasama dimulai dengan tiga aspek inti: (1) dinamika kolaborasi,

(2) tindakan kolaborasi, dan (3) dampak serta adaptasi pada proses kolaborasi (Emerson et al., 2012a). Model ini dikenal sebagai *Collaborative Governance Regime* (CGR). Istilah "regime" digunakan untuk menggambarkan kumpulan prinsip yang eksplisit dan implisit, aturan, norma, serta prosedur pengambilan keputusan atau kebijakan yang berlaku dalam suatu area atau lingkup tertentu.



Gambar 2.3. Kerangka Kerja Integratif untuk *Collaborative Governance* “An Integrative Framework for Collaborative Governance”, (Emerson et al.,2012a).

1) Dinamika

Dinamika kolaborasi merupakan bagian terpenting dari proses kolaborasi. Seberapa baik kerjasama diimplementasikan dapat dilihat secara dinamis, termasuk pergerakan prinsip-prinsip

umum, motivasi bersama, dan kemampuan untuk bertindak bersama.

a) Prinsip Bersama

Beberapa cara untuk mendorong prinsip bersama melibatkan interaksi tatap muka atau melalui media teknologi sebagai perantara. Dalam konteks ini, terjadi penekanan ulang terhadap tujuan bersama, serta terbentuk dan berkembangnya prinsip bersama yang sering kali diungkap dalam berbagai pandangan dari para aktor yang terlibat. Dengan demikian, penyatuan prinsip-prinsip ini menjadi inti dari upaya ini. Dalam penggerakan keterlibatan berprinsip, beberapa komponen yang relevan adalah sebagai berikut:

- **Pengungkapan**

Proses mengungkapkan kepentingan, nilai-nilai aktor, dan upaya membangun kepentingan bersama merupakan tahap penting dalam kolaborasi. Pengungkapan ini melibatkan analisis mengenai alasan mengapa para aktor memutuskan untuk bergabung dalam kolaborasi tersebut.

- **Deliberasi**

Deliberasi dalam konteks kolaborasi terbentuk melalui proses diskusi bersama yang melibatkan keterbukaan dalam berpendapat, ekspresi ketidaksetujuan, serta memberikan ruang untuk diskresi. Melalui interaksi ini, terbentuk apa yang disebut sebagai "kualitas deliberasi." Dalam kerangka kolaborasi, proses deliberasi muncul

melalui diskusi bersama antara para aktor yang terlibat. Semua aktor menunjukkan komitmen untuk berdiskusi secara terbuka, yang tercermin dalam keinginan untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Ini terlihat dari presentasi yang diberikan oleh setiap pihak mengenai pencapaian kegiatan yang telah dilakukan.

- **Determinasi**

Determinasi dalam konteks kolaborasi merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menetapkan bersama tujuan kolaborasi. Terdapat dua jenis determinasi, yaitu determinasi primer dan determinasi substantif. Determinasi primer berkaitan dengan pembuatan keputusan prosedural, yang melibatkan aspek teknis dalam kolaborasi. Ini termasuk penetapan agenda, jadwal pertemuan, dan pembentukan kelompok kerja atau tugas. Sementara itu, determinasi substantif lebih fokus pada pembentukan kesepakatan bersama dan merumuskan rekomendasi final terkait tindakan-tindakan kolaborasi yang akan dilakukan di masa depan. Ini melibatkan aspek substantif atau isi dari kerjasama itu sendiri. Kedua jenis determinasi ini memainkan peran penting dalam membentuk arah dan tujuan kolaborasi, baik dari sisi teknis maupun substansial. Dengan mengatur kedua aspek ini, kolaborasi dapat berjalan lebih terorganisir dan efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan.

b) Motivasi Bersama

Motivasi bersama adalah elemen yang menguatkan siklus kolaborasi, yang terdiri dari faktor-faktor seperti kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Dalam konteks ini, ada beberapa komponen yang relevan dalam motivasi bersama adalah sebagai berikut:

- **Kepercayaan bersama**

Dalam konteks kolaborasi, usaha yang berkelanjutan dari interaksi diperlukan untuk saling mengenal (discover) satu sama lain dan membuktikan bahwa kepercayaan dapat diberikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini termasuk:

- **Pemahaman bersama**

Pernyataan tersebut merujuk pada pentingnya sesama aktor dalam kolaborasi saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Pemahaman bersama ini mengarah pada kualitas interaksi interpersonal antara individu dan organisasi yang terlibat dalam kolaborasi. Proses pembentukan pemahaman bersama ini sering kali dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang telah terbangun di dalam kolaborasi.

- **Legitimasi internal**

Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya pengakuan yang berasal dari kolaborasi internal . Pengakuan ini merujuk pada keyakinan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi dapat diandalkan dan memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas dan peran mereka. Dalam konteks ini, terdapat tiga elemen yang saling terkait erat dalam membangun motivasi bersama.

c) Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama

Yang dimaksud dengan konsekuensi elemen lintas departemen merujuk pada dampak atau implikasi dari integrasi elemen-elemen yang berasal dari berbagai departemen atau bagian organisasi yang berbeda. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan tindakan yang efektif dengan kemampuan yang sesuai dari berbagai aktor yang terlibat dalam kolaborasi atau kerjasama.

2) Tindakan *Collaborative*

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kolaborasi sangat bervariasi dan mencerminkan dinamika dari kolaborasi itu sendiri. Tindakan - tindakan ini bisa berupa berbagai jenis kegiatan, acara, diskusi, dan sebagainya. Kualitas baik atau buruk dari tindakan-tindakan ini dapat dilihat melalui pemahaman yang benar mengenai dinamika kolaborasi oleh para aktor dan individu yang terlibat dalam

kolaborasi tersebut. Tindakan-tindakan ini memiliki dampak yang beragam. Hasil langsung dari tindakan tersebut membawa dampak sementara yang dapat memengaruhi dinamika kolaborasi. Dampak ini bisa berupa perubahan dalam komunikasi, koordinasi, atau persepsi antara aktor-aktor yang terlibat. Dampak sementara ini pada gilirannya kembali berkontribusi pada dinamika yang ada dalam kolaborasi.

3) Dampak dan Adaptasi

Dampak yang dimaksud dalam konteks ini adalah efek atau perubahan yang muncul selama proses kolaborasi. Dampak tersebut memiliki beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi, termasuk dampak yang diharapkan, dampak yang tidak diharapkan, dan dampak yang tidak terduga. Dampak yang Diharapkan: Ini merujuk pada hasil-hasil yang diinginkan dan diantisipasi oleh para aktor dalam kolaborasi. Contohnya, "*small-wins*" yang merupakan pencapaian kecil yang berkelanjutan dan memberikan semangat kepada para aktor. Dampak ini membantu menjaga semangat dan motivasi kolaborasi. Dampak yang Tidak Diharapkan: Terkadang, tindakan dalam kolaborasi dapat menghasilkan dampak yang tidak diinginkan sebelumnya. Ini bisa berupa kendala, hambatan, atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak ini perlu diatasi dan diatasi oleh para aktor. Dampak Tidak Terduga: Dampak ini muncul secara tak terduga dan dapat bersifat positif atau negatif. Dampak ini bisa

timbul langsung atau tidak langsung dalam proses kolaborasi, dan perlu diidentifikasi dan ditangani. Semua dampak tersebut menghasilkan umpan balik, yang merupakan tanggapan dari aktor terhadap konsekuensi tindakan yang terjadi. Proses adaptasi mengacu pada bagaimana kolaborasi merespons umpan balik yang diberikan oleh para aktor. Adaptasi yang baik berarti kolaborasi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan masukan yang diberikan oleh aktor-aktor tersebut. Adaptasi yang sukses adalah yang tidak terpengaruh oleh kepentingan individu atau organisasi tertentu yang mungkin ingin mengambil manfaat lebih besar dari kolaborasi.

Adaptasi yang baik berbasis pada kebutuhan utama dari kolaborasi itu sendiri dan dapat membantu menjaga perkembangan dan kemajuan kolaborasi secara menyeluruh.

a. Koschmann, Kuhn, dan Piarrer (2012)

Dalam kajian yang dilakukan Koschmann Kuhn, dan Pfarrer menawarkan alternatif konsep collaborative governace dengan melihat bagaimana seharusnya praktik komunikasi yang terjadi diantara anggota sehingga mampu meningkatkan kualitas kolaborasi (Koschmann, 2012). Berikut ini penekanan pada konsep tersebut:

1. Meningkatkan peluang/ potensi berkolaborasi
 - Memperbaiki komunikasi agar lebih signifikan atau bernilaiBagaimana cara meningkatkan komunikasi di antara para anggota

sehingga aktivitas kolaboratif ini dapat meningkatkan potensi dan kemampuan semua anggota.

- Mengelola efek gaya tarik dan gaya tolak Bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam kolaborasi sehingga bisa dijaga keseimbangannya, melalui pendekatan seperti: (1) mengurangi resistensi atau pandangan yang berseberangan, sambil lebih fokus pada peningkatan kemampuan bersama; (2) meningkatkan fleksibilitas terhadap berbagai kepentingan dan fleksibilitas dalam keanggotaan; (3) menciptakan lingkungan geg mutual understanding dan penerimaan di antara anggota kolaborasi.
- Inovasi dan Identitas yang Unik Bagaimana cara memberikan suatu nama yang sejalan dengan tujuan kolaborasi untuk memperkuat keunikan dan menciptakan identitas yang kuat, serta mengembangkan suatu cerita yang terkait untuk meningkatkan keistimewaan dan memperkuat identitas yang terbentuk tersebut.

2. Menilai sebuah kolaborasi

- Pengaruh dari luar/ eksternal
(1) Evaluasi terhadap kolaborasi lebih condong pada kemampuan untuk memengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang penting, dan (2) memiliki potensi yang lebih besar untuk memengaruhi wewenang atau legitimasi organisasi serta entitas eksternal lainnya.
- Perubahan/ transformasi modal

1) Evaluasi terhadap kolaborasi lebih sering terfokus pada keterampilan dalam memengaruhi penjelasan atau keputusan yang diberikan kepada anggota, organisasi, atau entitas eksternal; serta (2) kapasitas untuk memengaruhi transaksi keuangan organisasi.

2.2.5 Kriteria Keberhasilan dan Kegagalan *Collaborative Governance*

Tolak ukur dalam *collaborative governance* adanya kriteria yang dapat menjadi faktor keberhasilan dan kegagalannya. Hal ini penting untuk dipahami secara jelas dalam menilai apakah praktik *collaborative governance* mengalami itu berhasil atau gagal dalam proses implementasinya. Dalam implementasi kolaborasi terdapat beberapa faktor penghambat yang ikut mempengaruhi berjalan tidaknya kolaborasi. Ada beberapa faktor dalam *Government of Canada* terhambatnya kolaborasi maupun partisipasi adalah disebabkan, antara lain: (1) faktor budaya; (2) faktor institusi; dan (3) faktor politik (Gravelle, 2008). Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut ini:

1) Faktor budaya

Kegagalan dalam Kolaborasi, Kendala dan Tantangan bisa disebabkan oleh budaya yang cenderung bergantung pada prosedur dan rasa takut untuk berinovasi serta mengambil risiko. Keberhasilan kolaborasi yang efektif menuntut bahwa para

penyelenggara pelayanan publik dan pemimpinnya harus memiliki keterampilan dan kesiapan untuk terlibat dalam kemitraan yang pragmatis dengan fokus pada hasil. Walaupun mungkin menggugat norma-norma konvensional dan menjalankan segala sesuatu dalam konteks kolaborasi, namun dalam pelayanan publik yang cenderung terikat pada prosedur dan enggan mengambil risiko, langkah semacam itu tidak mungkin bisa terwujud. Ketergantungan yang berlebihan pada prosedur justru menghambat kolaborasi dan tidak berkontribusi pada peningkatan kualitas kolaborasi.

Kecenderungan yang terlalu bergantung pada prosedur dan rasa takut untuk mengambil risiko adalah hambatan bagi pencapaian efektivitas dalam kolaborasi. Kegagalan kolaborasi juga muncul karena pemerintah masih mempertahankan pendekatan top-down saat menjalin kemitraan dengan pihak lain. Dominasi pemerintah yang berlanjut dan ketidakpatuhan terhadap kesepakatan berdasarkan semangat kerjasama dan prinsip egaliter seperti yang diperlukan dalam kolaborasi juga menyebabkan kegagalan.

Kolaborasi yang tidak berhasil juga disebabkan oleh minimnya partisipasi kelompok kepentingan atau *stakeholder* yang tidak dianggap penting dan cenderung diabaikan. Partisipasi ini sering kali didominasi oleh kelompok yang memiliki kekuatan atau pemerintah melalui pendekatan top-down. Kolaborasi yang buruk juga bisa muncul karena adopsi strategi penghancuran melalui pengakomodasian kepentingan kelompok yang mendukung

kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang menentang kebijakan tersebut.

2) Faktor Institusi

Kolaborasi dapat menjadi sulit karena institusi yang terlibat dalam kerja sama, terutama dari pemerintah, cenderung menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi lain yang ikut terlibat dalam kolaborasi. Institusi yang masih kuat dalam menerapkan struktur vertikal, akuntabilitas internal, dan arah kebijakan yang juga bersifat vertikal, tidak selalu sesuai untuk kolaborasi, yang memerlukan pendekatan horizontal antara pemerintah dan entitas non-pemerintah. Bahkan jika suatu pemerintahan mengadopsi sistem demokrasi, yang sering kali berbentuk demokrasi representatif, hal ini belum tentu cocok untuk kolaborasi karena demokrasi cenderung melibatkan proses yang lebih panjang dan formalitas yang lebih kompleks daripada kolaborasi yang berbasis kemitraan horizontal.

Kolaborasi cenderung memiliki unsur spontanitas yang kadang tidak memerlukan aturan yang ketat secara formal, dan kadang tidak mengikuti proses tradisional yang biasanya terjadi dalam organisasi dengan aturan standar yang kaku. Meskipun demikian, kolaborasi tidak bisa menggantikan tujuan-tujuan yang ditetapkan secara pusat dan kebutuhan-kebutuhan yang umumnya dihadapi oleh negara demokratis. Akuntabilitas institusi publik, khususnya organisasi pemerintah, seringkali hanya berpusat pada

akuntabilitas organisasional atau kepada atasan, serta mematuhi aturan yang ada. Dengan demikian, akuntabilitas dalam konteks ini lebih mengarah pada tanggung jawab.

3) Faktor Politik

Gagalnya kolaborasi bisa disebabkan oleh kurangnya inovasi dari para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan seringkali bertentangan. Kepemimpinan yang inovatif, yang memiliki wawasan ke depan, memiliki kemampuan untuk mengenalkan berbagai nilai dan tujuan yang dapat membentuk inti dari pemerintahan kolaboratif. Mereka dapat memberikan inspirasi terhadap agenda yang dijalankan dan membimbing menuju pencapaian hasil yang positif. Namun, kolaborasi bisa terhambat jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang memiliki inovasi dalam menghadapi tujuan-tujuan politik yang kompleks dan mungkin saling bertentangan.

Kolaborasi sering kali mampu mengurangi konflik tujuan yang mungkin timbul karena tujuan-tujuan yang diwakili oleh setiap kelompok kepentingan dapat diakomodasi. Namun, kegagalan kolaborasi dapat terjadi akibat perubahan kesepakatan awal dan perbedaan dalam kepentingan di antara pemangku kepentingan yang terlibat. Kolaborasi bisa berantakan ketika kesepakatan yang telah disetujui pada awal kerja sama mengalami perubahan, dan

munculnya kepentingan baru yang beragam di antara para pemangku kepentingan, termasuk pemimpin dari setiap kelompok.

Tantangan ini dapat menghambat dinamika kolaborasi dan mengarah pada kegagalan jika tidak ditangani secara efektif oleh para pemimpin dan pemangku kepentingan yang terlibat.

2.3 Stunting

World health organization (WHO) pada tahun 2015 menyatakan bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar (Sari & Rozi, 2022). Dan menurut world health organization (WHO) 2020, *stunting* adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan world health organization (WHO) yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK (Kementerian Kesehatan, 2022). Dikutip dari website halo sehat ditulis oleh (Karinta, 2023) bahwa, ada ciri-ciri genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, *stunting* mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun. *Stunting* memiliki gejala-gejala yang bisa Anda kenali, misalnya:

a. Pertumbuhan terlambat

- b. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
- c. Pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat
- d. Memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk
- e. Pubertas yang lambat
- f. Saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya
- g. Berat badan lebih ringan untuk anak seusianya

Pihak Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang menderita *stunting* akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. *Stunting* juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius.

Stunting adalah masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan social dan ekonomi dalam masyarakat. Ada bukti jelas bahwa individu yang *stunting* memiliki tingkat kematian lebih tinggi dari berbagai penyebab dan terjadinya peningkatan penyakit. *Stunting* akan mempengaruhi kinerja pekerjaan fisik dan fungsi mental dan intelektual akan terganggu Mann dan Truswell, (2002). Hal ini tersebut juga dan didukung oleh Jackson dan Calder (2004) menyatakan bahwa *Stunting* berhubungan dengan

gangguan fungsi kekebalan dan meningkatkan resiko kematian dalam (Permana, 2020).

Anak juga bertumbuh pendek bisa di sebabkan karena faktor *Short Stature* dimana panjang dan tingginya tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin berada dibawah rata-rata teman seusianya, sedangkan anak yang bertumbuh pendek karena stunting mengalami gagal tumbuh akibat kondisi kesehatan dan nutrisi yang tidak optimal. Anak pendek normal ada yang patologis, yang berarti patologis dilihat lagi, apakah patologis profesional ini salah satunya adalah stunting (Kementerian Kesehatan, 2022).

2.3.1 Dampak masalah *stunting*

Dikutip dari laman website Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2022) bahwa dampak stunting dapat mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang menderita *stunting* akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. *Stunting* juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius.

Faktor lain adalah penyakit infeksi berhubungan dengan kejadian *stunting* pada anak balita yang berada di pedesaan maupun perkotaan. Masalah kesehatan pada anak yang paling sering terjadi adalah masalah infeksi seperti diare, infeksi saluran

pernafasan atas, kecacangan dan penyakit lain yang berhubungan dengan gangguan kesehatan kronik.

Masalah kesehatan anak dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dikarenakan intake makanan menurun, menurunnya absorpsi zat gizi oleh tubuh yang menyebabkan tubuh kehilangan zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Masalah kesehatan yang berlanjut menyebabkan imunitas tubuh mengalami penurunan, sehingga mempermudah terjadinya penyakit atau infeksi. Kondisi yang demikian apabila terjadi secara terus menerus maka dapat menyebabkan gangguan gizi kronik yang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti *stunting*. Pendapatan atau kondisi ekonomi keluarga yang kurang biasanya akan berdampak kepada hal akses terhadap bahan makanan yang terkait dengan daya beli yang rendah, selain itu apabila daya beli rendah maka mungkin bisa terjadi kerawanan pangan di tingkat rumah tangga.

“Perlu adanya edukasi kepada calon orang tua dan orang tua untuk melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak balitanya.”

2.4.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mengkaji, menelaah serta untuk menganalisis topik tentang “*collaborative governance* dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pasangkayu” berikut ada beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan antara penelitian sebelumnya

dengan apa yang yang akan menjadi topik penulis mengenai pendekatan dalam penanggulangan *stunting*. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan untuk peneliti. Penelitian pertama yang dilihat oleh peneliti sebagai tinjauan penulisan adalah Seo Ah Hong (2019) dengan tema “Prevalensi dan variasi regional koeksistensi anak *stunting* dan kelebihan berat badan ibu atau obesitas di Myanmar”. Berdasarkan hasil penelitian, maka kajian tersebut bertujuan untuk menyelidiki beban ganda malnutrisi dalam rumah tangga di tingkat nasional dan subnasional dan untuk mengidentifikasi hubungannya dengan faktor sosiodemografi di Myanmar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa DBMN pada pasangan ibu dan anak menimbulkan tantangan di Myanmar. Hal ini memerlukan upaya terpadu segera untuk menghindari masalah ini melalui penggambaran strategi yang menanggapi kompleksitas intervensi gizi, seperti perbedaan kebutuhan individu dalam rumah tangga. Meningkatnya akses dan konsumsi makanan padat energi dan rendah nutrisi mungkin menjadi kendala utama terhadap gizi yang baik di Negara-negara berkembang (LMIC) seperti Myanmar. pada saat yang sama. Kebijakan dan program yang menasar kebutuhan pangan dan gizi setiap kelompok umur, bukan rumah tangga sebagai unit yang homogen, harus dipertimbangkan. Pendekatan pemeriksaan yang digunakan dalam Penelitian ini melakukan metode analisis sekunder dengan menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Myanmar (MDHS) tahun 2015–2016, yang merupakan

DHS (daftar hasil studi) pertama di Myanmar. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Olahraga dan didanai oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan Dana Tiga Tujuan Pembangunan Milenium. Pemilihan informasi menggunakan survei dan wawancara.

Penelitian ke dua (2) yang kemudian menjadi bahan tinjauan adalah jurnal (Silvia dkk 2022). Dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi data balita *stunting* dan penanganan pot ashanti (program orang tua asuh anak *stunting*)”. Universitas Muhammadiyah Manado Tahun 2022. Kajian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kembali data balita *stunting* serta menyusun Program Orang Tua Asuh Anak *Stunting* dalam penanggulangan kejadian *stunting*. Dalam kajian ini menggunakan metode evaluasi data sebelumnya dan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan serta tahap perkembangan. hal ini melanjutkan program orang tua asuh dengan fokus pada proses pengasuhan anak *stunting*, dalam hal ini edukasi tentang *stunting* maupun gizi balita *stunting*. Maka dari itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian *stunting*, seperti ekonomi, pendidikan ibu, kebutuhan ASI saat bayi, dan sanitasi. Maka dari kajian ini menyebutkan bahwa pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan serta pengkajian data keluarga dan pengukuran menggunakan Denver II yang juga dihubungkan dengan penelitian terkait, baiknya program POT ASHANTI dapat dilanjutkan dengan mencari donatur orang tua asuh agar pelaksanaan dan

pemantauan untuk pencegahan stunting kepada balita di Kelurahan Bailang dapat terlaksana bersama dengan instansi kesehatan maupun instansi pemerintah yang berada di Bailang.

Penelitian ketiga yang penulis angkat sebagai tinjauan pustaka adalah jurnal dari Sukanti dan Ahmad saufi (2021) yang berjudul “Dinamika *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan *Stunting* Ditengah Pandemi Covid-19” Lembaga Pengembangan Masyarakat Equator 2021. metode dalam anailisis ini menggunkakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk menilai darurat di bidang kesehatan terutama peningkatan gizi dan pemulihan dampak perekonomian menjadi semakin terpuruk. Di tengah situasi krisis ini, peran multi *stakeholder* sangat dibutuhkan dengan membangun komitmen, kesamaan perspektif, dukungan sumber daya dan kekuatan aktor. Akhir dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai aktor kunci kolaborasi harus mengembangkan ide dan gagasan yang mendorong para pihak untuk melakukan aksi strategis. Tidak hanya itu, dukungan sumber daya dan keterbukaan publik diperlukan untuk menciptakan kepercayaan dari semua stakeholder. Lemahnya dukungan dan pemerintah masih bersifat sentralistik dan dominan pada penguasaan sumber daya, menjadikan kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Kolaborasi menginginkan kesamaan perspektif,

menghormati inovasi dan menghindari adanya ketergantungan sumberdaya pada *stakeholder* lainnya.

Penelitian keempat yang menjadi acuan tinjauan pustaka penulis adalah jurnal Chamid sutikno dan Alban naufal (2023). Dengan judul “Proses *Collaborative Governance* Penanggulangan *stunting* di Kabupaten Brebes”. Program Studi Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Kajian yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Permasalahan *stunting* terhadap perkembangan anak dan balita saat ini menjadi salah satu perhatian khusus dimasyarakat yang dihadapi secara berkelanjutan oleh pemerintah baik di level pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Brebes khususnya Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan merupakan salah satu daerah yang memiliki komitmen dalam upaya menanggulangi dan percepatan terhadap penurunan angka *stunting* saat ini yang terbilang masih tinggi diatas standart rata-rata nasional maupun internasional. Metode dalam penelitian ini adalah *deskriptif* melalui pendekatan kualitatif dan teknik analisis data menggunakan triangulasi data dan sumber, sedangkan pemilihan informan dipilih berdasarkan kemampuan sesuai dengan kaidah *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan terbagi atas beberapa aspek yang meliputi kondisi awal dalam proses *collaborative governance* dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang tergolong dalam pemasalahan *stunting* di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Untuk memudahkan identifikasi dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka penulis merumuskan tabel comparasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

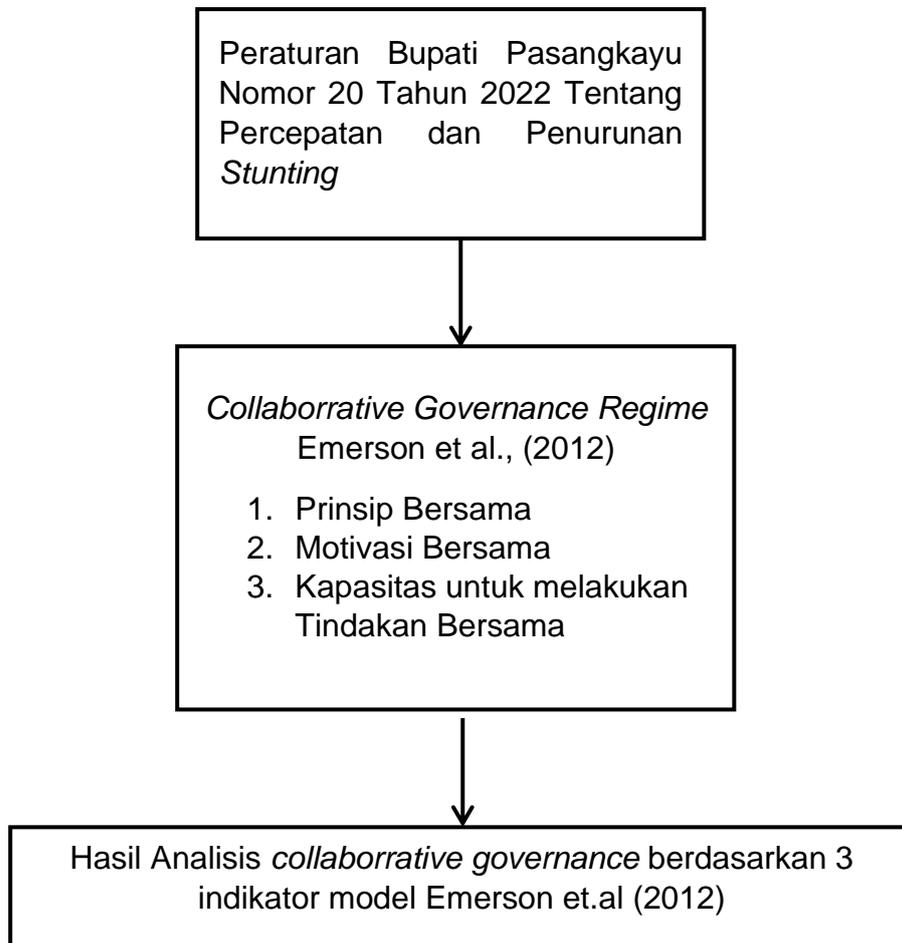
| No | Nama/Tahun/ Judul | Temuan dan Metode Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Seo Ah Hong (2019) "Prevalensi dan variasi regional koeksistensi anak stunting dan kelebihan berat badan ibu atau obesitas di Myanmar". | Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa DBMN pada pasangan ibu dan anak menimbulkan tantangan di Myanmar karena Kebijakan dan program yang menysasar kebutuhan pangan dan gizi setiap kelompok umur, bukan rumah tangga sebagai unit yang homogen, harus dipertimbangkan. Penelitian ini melakukan metode analisis sekunder, survei dan wawancara | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah, menyelidiki beban ganda malnutrisi dalam rumah tangga di tingkat nasional dan subnasional dan untuk mengidentifikasi asosiasinya hubungan dengan faktor sosiodemografi di Myanmar. |
| 2 | Silvia dkk 2022. "Evaluasi data balita stunting dan penanganan pot ashanti (program orang tua asuh anak Stunting)". | Kesimpulan dari penelitian menunjukkan program POT ASHANTI dapat dilanjutkan dengan mencari donatur orang tua asuh agar pelaksanaan dan pemantauan untuk pencegahan stunting kepada balita di Kelurahan Bailang dapat terlaksana bersama dengan instansi kesehatan maupun instansi pemerintah yang berada di Bailang. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, Berdasarkan hasil yang didapatkan dari pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan serta pengkajian data keluarga dan pengukuran menggunakan Denver II yang juga dihubungkan dengan penelitian terkait. Metode yang digunakan adalah evaluasi dengan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. |

| No | Nama/Tahun/ Judul | Temuan dan Metode Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Sukanti dan Ahmad saufi 2021. "Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19". | Hasil dari tinjauan menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai aktor kunci kolaborasi harus mengembangkan ide dan gagasan yang mendorong para pihak untuk melakukan aksi strategis. Tidak hanya itu, dukungan sumber daya dan keterbukaan publik diperlukan untuk menciptakan kepercayaan dari semua stakeholder. Lemahnya dukungan dan pemerintah masih bersifat sentralistik dan dominan pada penguasaan sumber daya, menjadikan kolaborasi tidak berjalan dengan baik. Kolaborasi menginginkan kesamaan perspektif, menghormati inovasi dan menghindari adanya ketergantungan sumberdaya pada stakeholder lainnya. | Dalam penelitian ini menggunakan teori model <i>collaborative governance</i> dari Emerson (2013) yang memuat tiga dimensi yakni prinsip-prinsip keterlibatan (principled engagement), adanya motivasi yang sama (shared motivation), dan adanya kemampuan dalam menjalankan tindakan secara bersama (capacity for joint action). Metode dalam analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). |
| 4 | Chamid sutikno dan Alban naufal (2023). Dengan judul "Proses Collaborative Governance Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes" | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian tersebut terbagi atas beberapa aspek yang meliputi kondisi awal dalam proses collaborative governance dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang tergolong dalam pemasalahan stunting di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. | Dalam penelitian ini menggunakan teori Menurut (Ansell dan Gash, 2008) Proses kolaboratif sebagai siklus meliputi, dialog bertatap muka (face to face dialogue), lalu membangun kepercayaan (trust building), juga komitmen terhadap proses (commitment to process), berbagi pemahaman (shared understanding), dan hasil sementara (intermediet outcomes). Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan teknik analisis data menggunakan triangulasi data dan sumber. |

2.5.1 Kerangka Pikir

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hasil dari proses *collaborative governance* dikerucutkan dengan memberi fokus pada Mengembangkan rencana aksi yang terperinci untuk mengimplementasikan intervensi yang telah dipilih. Menentukan tanggung jawab, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam menanggulangi angka *stunting*.

Dalam Mengidentifikasi dan memilih intervensi *collaborasi governance* yang efektif dalam menanggulangi angka *stunting*, berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik. Dalam penelitian ini, menganalisis mengenai *collaborative governance* dalam menanggulangi *stunting* sehingga dapat memberikan solusi untuk menjawab permasalahan empiris di bidang ini. Maka Studi ini menggunakan ide-ide dan teori-teori yang dikembangkan oleh (Emerson et al., 2012a). Ada 3 tahap yang menjadi patokan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan *collaborative governance*, (1) Prinsip Bersama, (2) Motivasi Bersama dan (3) Kapasitas untuk melakukan tindakan Bersama.



Gambar 2.4. Bagan Kerangka Pikir